

## Peran Kades dalam Pencapaian Target Nasional

**BANJARNEGARA (KR)**- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Kepala desa (Kades) dan perangkat desa mempunyai peran penting untuk menurunkan kasus stunting dan kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk itu Gubernur mengingatkan Kades dan perangkatnya agar menjalankan pemerintahan di desa secara akuntabel dan bersih dari korupsi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan hal ini saat silaturahmi akbar Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayudha Banjarnegara, Selasa (30/5). Ganjar mengatakan ada target penurunan stunting yang harus dijalankan Kades dan perangkatnya. "Target penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrem mesti kita kejar. Tentu saja inline dengan masa jabatan saya yang akan berakhir tanggal 5 September, kita genjot," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan banyak menerima masukan dari kades soal infrastruktur desa, khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Untuk itu Gubernur mencoba koordinasi agar coverage anggaran yang kurang-kurang ini bisa masuk program inpres dari infrastruktur desa. Gajar minta soal anggaran dan pengelolaan keuangan harus diperhatikan dengan baik. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga telah memberikan catatan karena ada keterlambatan. Namun khusus untuk Banjarnegara sudah tidak ada masalah. Pemrov Jawa Tengah tinggal mengingatkan daerah lain yang belum 100 persen.

Ganjar juga mengapresiasi karena selama dua periode memimpin, ada banyak desa yang berinovasi. Tidak hanya dari segi tata kelola, banyak desa berinovasi pada usaha desa termasuk BUMDes, kerjasama antardesa, bahkan banyak desa yang membuat aplikasi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. (Bdi)-f



KR-Budiono

**Ganjar Pranowo saat silaturahmi akbar Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayudha Banjarnegara.**

## Brimob Polda Jateng Amankan Waisak

**SEMARANG (KR)** - Ribuan personel Polda Jateng dikerahkan memberikan pengamanan pada peringatan Hari Suci Waisak 2023. Yang digelar di pusatkan di Candi Borobudur pada Minggu (4/6). Hal itu diungkapkan Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol Basya Radyananda pada waktu menjelang diskusi publik bertepatan Kemerdekaan Pers dan Perliindungan Jurnalis diprakarsai Humas Polri secara zoom meeting, Rabu (31/5) di ruang Vicon lantai 7 Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang.

Kombes Pol Basya yang didampingi Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. M Iqbal Alqudusy menyebutkan pengamanan juga dilakukan pada persiapan peringatan hari suci Waisak, termasuk perjalanan jalan kaki 32 biksu thudong dari negara asal Thailand lewat Brebes menuju Candi Borobudur. Ia mengatakan pengamanan khusus di kawasan Candi Borobudur diserahkan kepada polres setempat, yaitu Polresta Magelang dan Polres Magelang dengan pola pengamanan terbuka maupun tertutup.

Pengamanan juga dibantu Polda Jateng dan Brimob Polda Jateng untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Hari Raya Waisak maupun masyarakat umum. "Satuan dari Polda Jateng dan Brimob Polda Jateng akan didorong membantu pengamanan di Polresta Magelang dan Polres Magelang. Harapan kami, perayaan Waisak di Jateng bisa berjalan aman dan lancar," ucapnya. (Cry)-f

## Pengurus FPRB Boyolali Dikukuhkan

**BOYOLALI (KR)** - Dalam rangka kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali menggelar acara pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Boyolali Masa Bakti 2023 - 2024. Agenda pengukuhan pengurus FPRB oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Boyolali, Selasa (30/5).

Ditemui usai acara, Bupati Said berharap agar 30 pengurus yang baru saja dikukuhkan segera melakukan koordinasi yang baik bagaimana pengurangan resiko bencana di Kabupaten Boyolali dapat dipersiapkan dan ditangani sebaik-baiknya. "Maka kekompakan, ketulusan, keikhlasan menjadi dasar yang terpenting ketika forum ini kembali kita kukuhkan," ujarnya. Meski tidak mengharapkan bencana, namun dalam rangka kesiapsiagaan maka pihaknya berharap agar FPRB dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk mengurangi resiko terjadinya bencana.

Salah satu pengurus FPRB yang merupakan Ketua Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 32 Kabupaten Boyolali, Ayub Sarjono mengatakan, dimasukkannya RAPI dalam kepengurusan sesuai dengan tupoksi komunikasi dan informasi. (Mul)-f



KR-Mulyawan

**Bupati Boyolali M Said Hidayat mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Boyolali Masa Bakti 2023 - 2024.**

## Pansus III DPRD Grobogan Sempurnakan Isi Raperda Pajak



### GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

**GROBOGAN (KR)** - Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Grobogan, Selasa pekan lalu, melanjutkan pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat berlangsung di ruang Paripurna I Gedung DPRD dipimpin Ketua Pansus II Hj Lusida Indah Artiani SE MM, dihadiri Kepala BP-PKAD, Kabag Hukum Setda, dan seluruh Kepala OPD terkait.

Dalam rapat kerja tersebut, semua peserta yang hadir membawa bahan raperda yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama. Raperda tersebut terdiri XI Bab, dan 103 pasal. Bab I menguraikan tentang Ketentuan Umum yang terdiri 2 pasal, Bab II menguraikan Pajak Daerah terdiri 54 pasal, Bab III tentang Retribusi Daerah yang terdiri 26 pasal, Bab IV tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri 7 pasal, Bab V tentang Pengurangan, Keringan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri 2 pasal.

Kemudian Bab VI tentang Kerahasiaan Wajib Pajak

yang terdiri 1 pasal, Bab VII tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri 1 pasal, Bab VIII tentang Ketentuan Penyaluran terdiri 1 pasal, Bab IX tentang Ketentuan Pidana yang terdiri 5 pasal, Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri 2 pasal, dan Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri 2 pasal.

Dalam pembahasan isi raperda tersebut, sebagian besar hanya sebatas mencocokkan kalimat atau redaksi pada pasal yang ada. Namun juga ada peserta yang meminta kejelasan tentang retribusi atau tarif parkir di tepi jalan umum, dan parkir di tempat khusus di halaman pasar umum milik daerah. Menurut keterangan Kepala BPPKAD, Anang Armunanto SSos MSI, retribusi parkir di tempat khusus disesuaikan kebijakan yang dilakukan OPD bersangkutan. Sedangkan tempat parkir di halaman rumah sakit, pasara, dan toko modern dikenakan pajak parkir. Apakah tempat parkir tersebut diselenggarakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos MAP, menerangkan materi Raper-

da Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disampaikan Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM kepada DPRD dalam rapat paripurna Dewan ke-8 pada tanggal 29 Maret 2023. Kemudian telah ditanggapi oleh Dewan dalam bentuk Pemandangan Umum Fraksi-fraksi. Bupati sendiri sudah menjawab pemandangan umum ketujuh fraksi pada rapat paripurna ke-12, tanggal 27 April 2023.

Sebelumnya, Bupati Grobogan mengatakan, pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk memungut pajak.



KR-M Taslim

**Pansus III DPRD Grobogan saat raker melanjutkan pembahasan dan penyempurnaan Raperda Pajak Daerah.**

## TAK INGIN SALAH KELOLA KEUANGAN DESA

# Polosoro Kerja Sama dengan Kejari Purworejo

**PURWOREJO (KR)** - Paguyuban Lurah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Kabupaten Purworejo (Polosoro) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo.

Puluhan kades yang tergabung dalam Polosoro wilayah Kecamatan Purwodadi dan Kepala Kejari Purworejo menandatangani nota kerja sama di Kecamatan Purwodadi, Senin (29/5).

Kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang dibangun antara pimpinan Polosoro dengan Kejari Purworejo.

"Kerja sama ini tindak lanjut dari keinginan Presiden Jokowi yang menginstruksikan jaksa melakukan pendampingan dan edukasi tentang pengelolaan keuangan desa," ungkap Ketua Umum Polosoro Suwanto, Selasa (30/5).

Kerja sama, katanya, akan dilakukan seluruh desa di Purworejo. Namun, penandatanganan nota perjanjiannya dilakukan secara bertahap dan diawali dari 40 desa di Kecamatan Purwodadi.

Perjanjian kerja sama akan ditandatangani oleh kades di Kecamatan Bayan, Bagelen, dan Gebang. "Kerja sama ini tanpa paksaan, tapi begitu kami sampai, seluruh rekan kades setuju untuk adanya pendampingan dari Kejari Purworejo," ucapnya.

Tindak lanjut dari kerja sama itu adalah dibukanya keran konsultasi antara kepala desa dengan

tim hukum Kejari Purworejo. Kades, kata Suwanto, dapat berkonsultasi tentang berbagai potensi masalah terkait pengelolaan keuangan desa, persoalan pidana, atau perdata. Menurutnya, kerja sama itu memberi manfaat besar bagi kades anggota Polosoro.

"Kami sadar jika sebagian besar kades itu ilmunya rendah, mereka berasal dari berbagai latar belakang, tapi dalam mengabdikan, dihadapkan dengan potensi persoalan yang besar, terutama berkaitan dengan hukum dalam pengelolaan keuangan. Kami butuh pendampingan dan pemahaman dari ahli hukum, karena tak ingin salah langkah dalam pengelolaan keuangan desa," paparnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Purworejo Eddy Sumarman SH MH mengemukakan, pemegang

kebijakan di desa harus berhati-hati dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan. Dijelaskan, potensi penyimpangan pengelolaan keuangan desa dapat terjadi di semua tahapan pembangunan. "Mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Semuanya mempunyai potensi penyimpangan," ujarnya.

Ditambahkan, penyaluran dana oleh pemerintah pusat ke desa, selalu memiliki dinamika. Sebab, lanjut Eddy, masih ada kepala desa dan perangkat yang lemah dalam mengelola dana desa. Selain itu, katanya, pemberian dana ke desa dalam jumlah besar kerap belum diikuti dengan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa. (Jas)-f

## PDAM Siapkan Dana Buka Usaha AMDK

**SALATIGA (KR)** - PDAM Salatiga Bakal memiliki usaha produksi air mineral dalam kemasan (AMDK). PDAM menyiapkan modal Rp 450 juta. Direktur PDAM Salatiga, Samino mengatakan usaha ini merupakan hasil studi tiru ke PDAM Kabupaten Sleman dan PDAM Kota Yogyakarta.

Hasil studi tiru ternyata rata-rata PDAM yang menjalankan usaha AMDK menggunakan sistem maklon atau kerjasama dengan produsen air kemasan yang sudah ada. Dari segi risiko lebih ringan daripada produksi sendiri. Modal

yang dibutuhkan sekitar 450 juta untuk sistem maklon.

"Rencana mulai bulan Juni kami sudah melangkah. Selanjutnya untuk proses izin maklon estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 bulan," kata Samino, Rabu (31/5).

Penjabat (Pj) Walikota, Sinoeng N Rachmadi memberikan persetujuan terkait rencana yang dilakukan oleh PDAM Kota Salatiga. Menurutnya, Untuk pemilihan mitra otorisasi manajemen. Kuasa pengguna modal tidak akan menunjuk terkait mitra kerja, "Sa-

ya hanya akan meminta mengkaji mana yang memberikan keberpihakan berkelanjutan. Direktur PDAM, dengan pengawasan nanti yang akan melakukan pematangan dan penentuan mitra," ungkap Sinoeng N Rachmadi.

Pemkot Salatiga memberi mandat kepada manajemen dan Dewan Pengawas untuk melakukan penanaman bisnis, keputusan menentukan mitra bisnis didasarkan dari studi empiris hasil studi yang dilakukan, dan diberikan keputusan manajemen untuk menentukan mitra usaha.

Selanjutnya cantumkan usaha dalam unit bisnis yang berdiri sendiri. Besaran investasi menjadi manajemen dan Dewan Pengawas untuk memulai bisnis.

Asisten II Pemkot Salatiga, BPH Pramusinta juga berkenan memberikan masukan terkait rencana pendirian usaha AMDK. "Dalam pembuatan kemasan harus ada ciri dan tidak bisa dipalsukan, rasa air juga menjadi alasan dipilihnya mitra, kualitas kemasan juga harus baik, pada hitungan awal perencanaan jangan sampai rugi," Pramusinta. (Sus)-f

## Sustainability, Tantangan Zero Stunting 2030

**BERBAGAI** upaya konsisten dilakukan untuk penurunan stunting di Indonesia. WHO menargetkan zero stunting di 2030 untuk anak baduta (bawah dua tahun) di tiap negara, dengan target batas prevalensi maksimal 2,3%. Berbagai kebijakan diterapkan untuk mencapai tujuan itu.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (FK Unimus) Hema Dewi Anggraheny yang juga mahasiswa S3 Prodi IKM FK UNS menyampaikan penguatan metode pemerintah untuk menilai secara akurat kasus stunting, melalui perencanaan dan monitoring yg efektif, akan mempengaruhi keberhasilan program. Tahun 2021,

presiden mengeluarkan Perpres no 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan tidak hanya menasar pada anak, namun juga mulai dari remaja dan ibu hamil.

"Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia, termasuk di kota Semarang. Berbagai program dilakukan seperti Si Bening, DASHAT, rumah pelita, serta Gerakan orang tua asuh bagi anak stunting dengan sosial ekonomi miskin. Upaya tersebut membuahkan hasil penurunan prevalensi stunting hingga 10% di 2022-2023 ini. Bahkan Pemerintah Kota Semarang menargetkan zero stunting di 2024. Namun akankah penurunan stunting ini mencapai zero stunting di



KR-Sugeng Irianto

**Hema Dewi Anggraheny** 2030?" ujar Hema Dewi Anggraheny.

Sampai Maret 2023 lalu jumlah anak stunting masih cukup tinggi di Semarang, walaupun persentasenya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi bagaimana mencapai target zero stunting, serta bagaimana sustainability

atau keberlanjutan dari upaya yang sudah dilakukan. Dalam menangani stunting perlu melihat beberapa faktor yang mendasari, salah satunya sosial ekonomi.

"Penanganan stunting dengan sosial ekonomi miskin berbeda dengan sosial ekonomi menengah-tinggi. Pada anak dengan sosial ekonomi miskin, tidak ada biaya belanja kebutuhan dasarnya, apalagi untuk menyediakan makanan bergizi dan memberikan praktik makan sesuai standar. Upaya yang dilakukan secara aktif hanya memberikan subsidi makanan siap saji untuk anak yang stunting" ujarnya

Hal itu berbeda pada anak stunting dengan so-

sial ekonomi menengah-tinggi. Mereka masih bisa mencukupi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Faktor risiko terbesar pada perilaku praktik pemberian makan meliputi ketersediaan pangan sesuai anjuran pemenuhan gizi anak, penjadwalan makan, teknis tatacara pemberian makan, serta higienitas dalam praktik makan.

"Memahami kondisi setiap individu dan keluarganya, dengan menemukan masalah dari setiap individu dapat memberikan solusi tepat bagi mereka. Terutama pada anak stunting dari sosial ekonomi menengah-tinggi, perubahan perilaku menjadi sasaran intervensi. (Sgi)-f